

**RELASI ISLAM DAN NEGARA**  
**(STUDI PEMIKIRAN POLITIK IR. SUKARNO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD YUSUF AWALUDDIN**

**00370474**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Drs. H. ZARKASYI ABDUL SALAM**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

**Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Yusuf Awaluddin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusuf Awaluddin

N.I.M : 00370474

Judul : "RELASI ISLAM DAN NEGARA, (Studi pemikiran politik  
Ir. Sukarno)".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H.

20 Agustus 2005 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

pembimbing I

  
Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam  
NIP. 150 046 306

**Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Muhammad Yusuf Awaluddin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusuf Awaluddin  
N.I.M : 00370474  
Judul : "RELASI ISLAM DAN NEGARA, (Studi pemikiran politik  
Ir. Sukarno)".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

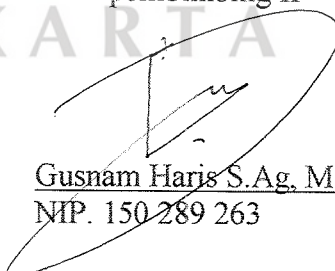
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H.

20 Agustus 2005 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

pembimbing II

  
Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 289 263

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**RELASI ISLAM DAN NEGARA (Studi Pemikiran Politik Ir. Sukarno)**

**PENGESAHAN**

Yang disusun oleh:

**MUHAMMAD YUSUF AWALUDDIN**

00370474.

telah dimunaqasyahkan di depan sidang sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 22 September 2005 M. / 18 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Rajab 1426 H.  
22 September 2005 M.


DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
  
Drs. H. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 150 260 056

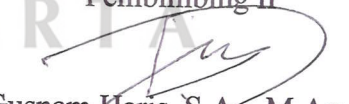
Sekretaris Sidang

  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 150 260 056

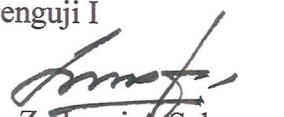
Pembimbing I

  
Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam  
NIP. 150 046 306

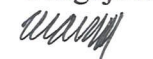
Pembimbing II

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 289 263

Penguji I

  
Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam  
NIP.150046306

Penguji II

  
H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 012

## MOTTO

ان أكرمكم عند الله  
\* أتقاكم

"Sesungguhnya orang yang mulia disisi Allah adalah orang yang bertaqwa diantara kamu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\* Al-Hujarat (49) : 13.

## ABSTRAK

Polemik mengenai hubungan antara Islam dan negara berawal dari tahun 1924, ketika Kemal Pasha mensekulerkan Turki. Keputusan Kemal ini mendapat reaksi dari para cendekiawan muslim baik yang pro maupun yang kontra di seantero dunia. Pertentangan ideologis ini juga terjadi di Indonesia, yang saat itu hendak menjadi negara merdeka. Perdebatan ini berlangsung pada sidang BPUPKI, ketika Ki Bagus Hadikusumo yang mewakili golongan Islam puritan menghendaki negara Islam, sedangkan golongan nasionalis tidak menghendaki Islam dijadikan dasar negara. Sebagai kompromi pertentangan ideologis tersebut, Sukarno mengajukan konsepsinya mengenai dasar negara yang kemudian terkenal dengan sebutan Pancasila. Pertentangan ideologis ini menghebat pada tahun 1940-an antara Sukarno versus Natsir. Pertentangan ideologis ini terulang kembali ketika rezim Orde Baru runtuh. Demokratisasi memberikan peluang kebebasan berpendapat dan berideologi telah memunculkan kembali perdebatan mengenai dasar negara. Hubungan agama (Islam) dan negara mencuat ke permukaan nasional. Munculnya partai Islam, kerusuhan sosial yang mengandung unsur SARA di sejumlah daerah dan fenomena terorisme (peledakan bom) yang mengusung tema Agama (Islam) adalah menunjukkan bahwa masalah mengenai hubungan antara Islam dan negara belum tuntas.

Berbicara tentang pemikiran seorang aktor sejarah pada zaman tertentu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, sosial, budaya, dan situasi intelektual yang berkembang pada saat itu. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, dengan tujuan untuk meneliti hubungan antara ide pada satu pihak, kecenderungan emosional di pihak lain dan kepentingan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian mendeskripsikannya secara general pokok-pokok pemikiran Sukarno dan menganalisisnya dengan menggunakan nalar *deduktif*, dengan tujuan untuk mencari sinergi dengan konsepsinya mengenai relasi Islam dan negara.

Dalam konteks kekinian (orde reformasi), hubungan Islam dan negara harus dirumuskan secara total, sehingga tidak ada lagi ganjalan di kemudian hari, yang berakibat pada kerusuhan sosial, terorisme dan sebagainya. Oleh karena itu, mempertimbangkan kembali pemikiran tokoh pendiri bangsa mutlak diperlukan, dan Sukarno menawarkan ideologi Nasionalisme sebagai pemersatu.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa pandangan Sukarno mengenai hubungan antara Islam dan negara harus dipisah. Dengan asumsi dalam Islam tidak ada ayat yang secara tegas menganjurkan berdirinya negara Islam, Islam hanya memberikan dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang baik (Islami) dan tidak adanya kesepakatan ulama' mengenai negara Islam semakin mempertegas pendirian Sukarno. Di samping itu, menurut pandangannya, agama adalah urusan pribadi. Sukarno juga lebih tertarik untuk mengambil sisi substansi Islam (aqidah) daripada syari'ahnya. Hal ini menunjukkan bahwa warisan budaya Jawa (*kejawen*) masih begitu kental dalam benak pemikiran Sukarno. Dan hal inilah yang melatar belakangi pemikiran Sukarno menolak Islam dijadikan dasar negara.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وشكره على نعمة الله لا حول ولا قوة الا بالله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صلي وسلم وبارك علي حبيبنا و شفيعنا، نبينا و مولانا محمد و علي اله واصحابه اجمعين، اما بعد:

Segala puji dan syukur di panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan ni'mat Nya kepada kita semua khususnya kepada kami yang pada akhirnya mengantarkan kepada terselesaikannya upaya penyusunan skripsi, yang setelah sekian lama telah terbengkalai oleh aral rintangan yang menghadang yang berasal dari diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita tanpa penerangan pengetahuan menuju zaman yang berbudaya.

Diskursus tentang negara hampir tidak pernah berhenti, lebih-lebih bila dikaitkan dengan masalah agama. Alasannya sangat jelas dan sederhana. Tidak seorangpun, dalam kenyataan ini, terbebas dari jari-jemarinya negara dan agama. Oleh karena itu, keberadaan lembaga negara seharusnya memang masuk dalam agenda kepedulian agama, jika memang benar-benar agama hendak membebaskan manusia. Mustahil jika sebuah proyek pembebasan manusia tanpa memperhitungkan eksistensi negara. Sejarah agama-agama besar pada khittah awalnya adalah sebagai “ruh pembebasan”, seperti terlihat pada sejarah Isa, Musa, Sidharta, berdiri tegak pada posisi ini.

Sementara dalam perkembangan selanjutnya, setelah agama menampakkan diri lebih sebagai badan, sebagai organisasi seperti halnya negara, lahirilah kenyataan baru perihal hubungan agama dan negara. Mula-mula ia berdiri agak merunduk di belakang negara, kemudian bergerak di sampingnya, dan akhirnya merangkul pundak negara bahkan lebih jauh, bertindak sebagai negara itu sendiri. Jadilah apa yang kita kenal negara-agama.

Wacana mutakhir aspek-aspek politik Islam membelah umat menjadi dua, kubu yang berpikir jernih dan kubu yang beremosi tulus. Umat Islam yang beremosi tulus, terlalu berhati-hati memandang warisan politik Islam. Mereka cenderung memperlakukannya sebagai sesuatu yang sakral. Sedangkan analisis jernih terhadap warisan itu dilakukan oleh para akademisi non-muslim atau elemen-elemen lain yang berusaha mendiskreditkan Islam.

Upaya mengakhiri lingkaran setan dan perangkap emosi tulus itu sudah menjadi kebutuhan mutlak. Umat Islam sekarang harus mengkritisi warisan Islam dengan usahanya sendiri, tanpa harus meninggalkan komitmen mutlak pada idealitas yang telah membentuknya. Karya ini merupakan usaha paling sederhana untuk menyumbang dan mengembangkan sisi positif dari pandangan kritis atas warisan Islam, lebih-lebih dalam konteks politik Indonesia setelah jatuhnya orde baru, perangkap emosi tulus ini telah berdampak pada kengerian atas pembunuhan masal di sejumlah daerah, seperti kasus kerusuhan sosial yang berbau agama di Ambon, Poso dan sebagainya serta munculnya terorisme peledakan bom atas nama agama.



Selesaiya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, bantuan materiil dan spirituil. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

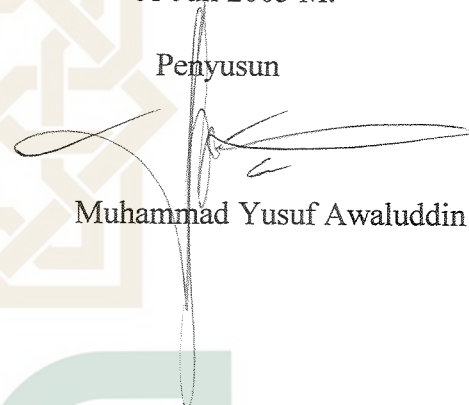
1. Bapak K.H. Drs. Malik Madaniy, MA. selaku dekan fakultas syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing satu dan dua. Penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.
3. Rasa hormat dan terima kasihku kepada bapakku dan ibuku, atas segala sokongan, dukungan dan do'a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai. Terima kasih juga kuucapkan untuk adikku satu-satunya Elly Surya atas segala perhatian dan pengertiannya yang menjadi cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti.
4. Terima kasih untuk teman-temanku kelas JS-2 "00", kebersamaan dan kehangatan persahabatan kita akan terus kukenang.
5. Spesial terima kasih untuk temanku Ujang, Maskur, Ilham, Rosid, Imdad, Muhdi, Sis, Yazid, Salim, Yatim, dan teman-temanku di Alaska sebagai teman sekaligus keluargaku di Yogyakarta.

Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu. Penyusun menyadari bahwa, dalam proses penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh

karena itu, penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridla Allah SWT selalu menyertai kita semua, *amin*.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1426 H  
01 Juli 2005 M.

Penyusun



Muhammad Yusuf Awaluddin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *ahmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *saluha*.

### Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *misaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *usul*

### Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq.*

### Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد      ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

## Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطاءء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائبء ditulis *rabâ'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذونء ditulis *ta'khuzûna.*

## Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرةء ditulis *al-Baqarah.*

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf اء diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساءء ditulis *an-Nisa'.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITER ARAB.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II. PENGERTIAN NEGARA DAN AGAMA</b>	
<b>A. MEMAHAMI AGAMA</b>	
1. Pengertian Agama.....	22
2. Agama Islam.....	23
3. Hubungan Vertikal dan Horizontal dalam Islam.....	26
a. Aqidah.....	26

b. Syari'ah.....	27
c. Akhlaq.....	30
<b>B. MEMAHAMI NEGARA</b>	
1. Definisi negara.....	32
2. Unsur-unsur negara.....	34
a. Penduduk.....	34
b. Wilayah.....	37
c. Pemerintah.....	40
d. Kedaulatan.....	41

**BAB III. POKOK-POKOK PEMIKIRAN SUKARNO TENTANG  
NEGARA DAN AGAMA**

<b>A. Biografi</b>	
1. Keluarga.....	43
2. Pendidikan.....	51
3. Berkenalan dengan Islam.....	58
<b>B. Ideologi negara dalam pandangan Sukarno</b>	
1. Islamisme.....	61
2. Marxisme.....	62
3. Nasionalisme .....	64
4. Sosialisme .....	72
5. Marhaenisme.....	74
6. Pancasila.....	78
7. Demokrasi.....	81



C. Islam dalam pandangan Sukarno	
1. Islam agama spiritual.....	83
<b>BAB IV. ANALISIS PEMIKIRAN SUKARNO TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA SERTA RELEVANSINYA DENGAN WACANA POLITIK INDONESIA PASCA ORDE BARU</b>	
A. PEMISAHAN AGAMA DAN NEGARA	
1. Pandangan Sukarno tentang relasi Islam dan negara.....	87
2. Kesepakatan Ulama' tentang relasi Islam dan negara.....	97
3. Tanggapan atas pemisahan negara dan agama.....	99
B. WACANA POLITIK PASCA ORDE BARU TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA	
1. Orde reformasi era euphoria Politik .....	101
2. Munculnya Partai politik umat Islam .....	104
3. Menuju Nasionalisme baru : Belajar dari konsep relasi Islam dan negara Ir. Sukarno.....	108
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. LAMPIRAN I.....	I
2. LAMPIRAN 2.....	II
3. CURRICULUM VITAE PENYUSUN.....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengertian terbatas, secara riil, tidak ada suatu tindakan manusia yang dapat lepas dari pengamatan negara.<sup>1</sup> Kenyataan ini, dapat dianggap, sebagai akibat dari semakin dominannya peran negara dan tersub-ordinasinya peran agama dalam kehidupan sosial. Agama disini dipahami hanya sebagai tanggungjawab individu-individu dalam hubungannya dengan yang transendental. Sebaliknya, negara dipandang sebagai institusi pemerintah yang memiliki kekuatan untuk memaksa dan tidak mempunyai kewajiban terhadap keberlangsungan hidup agama. Pemisahan agama dengan negara (sekularisasi) dalam konteks ini dipersepsikan sebagai alternatif dalam upaya pembangunan sistem politik.<sup>2</sup>

Agama yang pada abad pertengahan memainkan peranan begitu dominan, dimana pra-syarat kepemimpinan ditentukan atas dasar pertimbangan agama. Begitu pula dengan para pemimpin negaranya dalam upaya melanggengkan kekuasaannya mencari legitimasi agama, seperti pemakaian gelar Imam dan Khalifah. Agama dan negara dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak

---

<sup>1</sup> Masdar F. Mas'udi, *Negara (...)*, suatu pengantar dalam Abdul Waheb, Effendi, Al, *Masyarakat tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Terj, Amiruddin Ar Rani, (Yogyakarta : LkiS, 1994 ), hlm.V.

<sup>2</sup> Sekularisasi dalam pandangan Muhammad Arkoun adalah sebuah titik temu antara agama Islam dengan agama Kristen Lihat. M. Arkoun, *Islam Agama Sekuler, Penelusuran Sekularisme dalam Agama-agama Di Dunia*, terj. Sunarwoto Dema, (Yogyakarta : Belukar,2003), hlm.93-114

mempunyai otonomi tersendiri, sehingga perlu saling melengkapi. Pandangan ini menjadi berbeda ketika dunia mulai memasuki abad pencerahan. Sejak abad pencerahan (*aufklarung*) hingga abad modern kebersatuan agama-negara menjadi problematis dalam menjalankan langkah-langkah kebijakan pemerintah atau kerja politik. Pada satu sisi, agama sebagai produk Ilahi yang kebenarannya harus diyakini secara totalitas. Pada satu sisi lain justru sebaliknya, negara yang merupakan produk dialektika historis<sup>3</sup> manusia yang keabsahannya masih perlu dipertanyakan. Walaupun keduanya mempunyai misi yang sama, yakni menata kehidupan manusia agar teratur, tetapi proses penerimaan dan landasan keduanya berbeda.

Perbedaan penerimaan kedua institusi itu salah satu sebabnya ditentukan oleh perkembangan rasionalitas. Agama yang pada mulanya dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan mempunyai potensi mempersatukan umat manusia dalam suatu “organisasi kekuasaan teologis”, pada abad modern kewibawaannya mulai dipertanyakan. Landasan organisasi kekuasaan dipandang bukan lagi terletak pada aspek teologis, namun pada sistem pemerintahan rasional dengan meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.

---

<sup>3</sup> Menurut Ibn Khaldun timbulnya negara adalah sebab adanya perbedaan cara orang memperoleh penghidupan yang akhirnya mereka hidup bermasyarakat dan saling melengkapi yang kemudian membentuk sebuah peradaban. Karena sudah menjadi tabiat manusia untuk saling menguasai dan menindas timbulah pertikaian, perkelahian dsb. Yang akhirnya mereka membutuhkan seorang juru penengah sekaligus hakim yang kemudian menjadi raja. Lihat. Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus), cet III, hlm. 141. H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ( Jakarta : UI-Press , 1993 ), hlm.99-101

Ditilik dari perspektif historis, kenyataan diatas hanya merupakan salah satu indikasi dari peran ganda yang dimiliki dan dimainkan oleh agama. Pada satu sisi agama didalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran mutlak, dalam wajah konkretnya malah menjadi sumber pertikaian tajam, bahkan fanatisme.<sup>4</sup> Di sisi lain, agama juga berfungsi sebagai pemersatu. Kedua peran agama itu dalam prakteknya ditentukan oleh kadar fanatisme seseorang dalam memegang relegiusitasnya.<sup>5</sup>

Kedua peran agama tersebut di atas tampak, misalnya, ketika Islam digunakan sebagai lambang perjuangan untuk mempererat solidaritas dalam pembentukan faham kebangsaan pribumi (nasionalisme Indonesia), seperti yang dilakukan oleh H.O.S. Cokroaminoto dalam Sarekat Islam<sup>6</sup>.

Pandangan ini menjadi berbeda ketika pergerakan Indonesia memasuki dasa warsa ketiga dan satu dasa warsa setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 30-40 yang berlanjut sampai 1950-an di kalangan elit politisi Indonesia yang mayoritas *nota bene* orang Islam, terjadi diplomasi politik dan kompetisi ideologi antar kekuatan politik. Masa itu ditandai dengan pergumulan intelektual,

---

<sup>4</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta : Paramadina,2001), hlm.1

<sup>5</sup> Lebih jauh mengenai sistem penganutan agama dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, Periksa Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm.283-284.

<sup>6</sup> Amelz, HOS Tjokroaminoto, *Hidup dan Perjuangannya*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1952), hlm.50.

yaitu polemik antara golongan Islam dan golongan kebangsaan<sup>7</sup> dalam mencari alternatif *filosofich grondslag* (landasan filosofis) bagi negara Indonesia, baik negara yang masih dalam *discoursus* idesional seperti yang terjadi pada dasa warsa 30-40 atau negara dalam pengertian institusi politik sebagaimana yang terjadi pada tahun 1950-an.

Polemik hubungan antara Islam dan negara sebenarnya berawal dari tahun 1924, ketika Kemal Pasha menghapus sistem kekhalifahan dan memisah urusan agama dan negara di Turki. Satu tahun kemudian Syeh Ali Abdur ar-Raziq menerbitkan bukunya yang berjudul "*Islam wa usulul hukm*" yang intinya menentang sistem teokrasi atau negara Islam, yang tentu saja, mendapat respon yang sangat keras dari ulama' muslim khususnya para ulama' Mesir, yang ketika itu ingin mendirikan kerajaan Islam setelah lepas dari imperialis Inggris.

Pertentangan ideolis ini juga terjadi di Indonesia, yang saat itu hendak menjadi negara merdeka. Perdebatan ini berlangsung pada sidang BPUPKI, ketika Ki Mangunkusumo yang mewakili golongan Islam puritan menghendaki negara Islam, yang tentu saja mendapat respon yang sangat keras dari golongan nasionalis yang tidak menghendaki Islam dijadikan sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini akhirnya mengalami kebuntuan dan mengarah pada disintegrasi. Sukarno kemudian mengajukan konsepsinya mengenai dasar negara, sebagai

---

<sup>7</sup> Istilah golongan Islam dan golongan kebangsaan di pakai dalam sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara ketika terpecah menjadi dua kubu. Lihat Imam Totok Raharjo, Catatan editor dalam Bung karno, *Wacana Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta : Grasindo, 2001), hlm.Viii

upaya untuk menyatukan golongan Islam dan nasionalis, yang kemudian terkenal dengan sebutan Pancasila.

Pada sidang konstituanate tahun 1959, merupakan kelanjutan sidang 10 November 1956, diwarnai konflik antar fraksi khususnya antara golongan yang berhaluan Islam dengan nasionalisme sekuler. Dari tiga masalah-bentuk negara, parlemen, dan kekuasaan kepala negara, yang menjadi objek pembahasan, mengenai bentuk negara, apakah akan membentuk negara Indonesia yang lepas dari ikatan agama atau mendirikan negara Islam<sup>8</sup>, merupakan permasalahan pelik dan sukar ditemukan jawabannya. Golongan Islam, khususnya Masyumi, menuntut agar negara Indonesia dalam mekanisme pemerintahannya harus diatur dengan sendi-sendi atau azas-azas syari'at Islam.<sup>9</sup> Keinginan dari golongan santri tersebut ditentang oleh golongan Nasionalis (abangan).

Aspirasi yang berwatak ideologis akibat pemahaman dan pengalaman keagamaan yang berbeda itu beradu sama kuat di depan meja perundingan sehingga membuat suasana ketika itu memanas. Dalam aspirasi ideologi yang disampaikan itu, misalnya bagi kalangan santri, argumen yang pokok dan sudah

---

<sup>8</sup> Menurut Boland, perdebatan dalam konstituante 1959 tidak bermula dari suatu rancangan Undang-Undang Dasar, tetapi berpangkal dari pembahasan azas-azas fundamental seperti bentuk pemerintahan, kelembagaan rakyat, dan kedudukan serta kekuasaan kepala negara, yang nantinya akan dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Lihat B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj. Safruddin Bahar, (Jakarta : Graffiti Press, 1985), hlm.94-95

<sup>9</sup> Perlunya memasukan Islam dalam urusan kenegaraan seperti yang diusulkan Masyumi menurut Rusli Karim karena; 1) Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia 2) Kelengkapan ajaran Islam dalam mengatur berbagai masalah kehidupan dan 3) Adnya toleransi dalam Islam .Lihat. M. Rusli karim, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial Politik*, (Yogyakarta : PT.Hanin dita , 1985), hlm. 179

menjadi harga mati ialah diantara agama dan politik merupakan satu kesatuan wilayah eksistensial. Karena itu, ia tidak bisa dipisahkan seperti memisahkan gula dengan rasa manisnya. Maka eksistensi negara Islam bagi kalangan santri mutlak adanya dan final.

Sukarno yang berdiri di pihak kaum nasionalis (abangan) menolak model pemerintahan yang didasarkan pada salah satu agama seperti yang diusulkan oleh masyumi. Situasi ketegangan ideologis itu, menurutnya, mempunyai tujuan yang sama, yaitu suatu usaha membangun sebuah negara modern yang berhubungan dengan hati-nurani para warganya; sebuah negara yang dengannya mereka, dalam kedua arti kata itu, dapat sampai kepada sebuah pemahaman. Oleh sebab itu, yang harus diusahakan oleh bangsa yang hendak dibangun adalah mencari persatuan *filosofische grondslag* (landasan filosofis) dan pandangan dunia yang dapat disetujui oleh semuanya.<sup>10</sup>

Sukarno meyakini sebagaimana masyarakat abangan lainnya, bahwa kepercayaan atau agama itu pada hakekatnya adalah urusan pribadi belaka. Ia merupakan manifestasi hubungan personal yang bersifat ruhaniah antara manusia sebagai *kawula* dan Tuhan sebagai *gusti*. Tentu saja pemahaman seperti ini berbeda dengan pandangan kalangan santri yang menyatakan bahwa hakekat

---

<sup>10</sup> Menurut Sukarno *filosofische grondslag* adalah fundamen, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya dibangun Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pidato Ir.Sukarno tanggal 1 Juni 1945 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1947 oleh Kementrian Penerangan Yogyakarta dengan judul lahirnya Pancasila. Dalam skripsi ini tulisan tersebut penulis dapatkan dari kumpulan tulisan Sukarno kenang-kengan 100 tahun Bung Karno dalam, Bung Karno, *Wacana Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta : Grasindo,2001), hlm.17

agama tidak sekedar menyangkut hubungan yang bersifat personal, tetapi lebih dari itu ia juga menyangkut hubungan spiritual yang bersifat kolektif (*hablu minallah wa hablu minannas*).

Berbicara tentang pemikiran seorang aktor sejarah pada zaman tertentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik, sosial-budaya, dan situasi pemikiran yang berkembang pada masanya. Untuk itu, sebelum membahas pemikiran Sukarno lebih jauh, perlu kiranya dijelaskan mengenai unsur-unsur yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan pemikirannya.

Pemikiran Sukarno terbentuk dan terpengaruh oleh perkembangan pemikiran yang hidup pada zamannya. *Pertama*, Sukarno terpengaruh oleh pola pemikiran masyarakat Jawa yang sinkretis. *Kedua*, dari pergumulannya dengan dunia pergerakan. Sukarno terpengaruh oleh pemikiran H.O.S. Cokroaminoto, Tan Malaka. Mengenai Islam, Sukarno terpengaruh oleh Syeed Amer Ali, Farid Wajidi, dan Cipto Mangunkusumo dan dinamika pergerakan kebangsaan di negeri-negeri Asia dalam pandangannya mengenai nasionalisme.

Mengenai unsur sosialisme yang melekat dalam pemikiran Sukarno, Sukarno terpengaruh oleh pemikiran tokoh-tokoh sosialis seperti ; Brailsford (Inggris), Pieter Jelles Troelstra (Belanda), Jean Jaures (Perancis), dan Karl Kautsky, Karl Marx, dan Friedrich Engels (Jerman). Pemikiran Sukarno tentang kenegaraan, ia terpengaruh oleh perkembangan pemerintahan Turki Usmani, khususnya ketika masa Kemal Atatürk dan Ziya Gökalp dimana keduanya



melakukan rasioanalisis dalam sistem pemerintahan Turki dengan menerapkan sekulerisme<sup>11</sup>.

Dari pluralitas *episteme*<sup>12</sup> yang diterimanya itu, Sukarno mengmbangkan dan mengekspresikanya dalam sebuah bentuk pemikiran setelah terlebih dahulu dibenturkan dengan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini ia lakukan disamping karena keterkaitanya secara mendalam kepada beberapa aspek sejarah Indonesia juga keinginannya untuk memainkan peranan penting dalam membentuk ortodoksi nasionalis. Buah pemikirannya seperti; Nasionalisme, Islam Marxisme, Marhaen, Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Nasionalisme, Mencapai Indonesia Merdeka, yang dikemukakanya pada masa pergerakan nasional dan nasakom yang dicetuskanya pada masa demokrasi terpimpin.

Dalam hal memisah agama dari negara seperti yang terjadi di Turki dan bagi seorang yang paradigma berfikirnya anti-elitisme, anti imperialisme-

---

<sup>11</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, kumpulan karangan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992 ), hlm.134. Mengenai banyaknya ide-ide dari pemikiran mereka yang dikutip oleh Sukarno, Ridwan Lubis menerangkan bahwa pemikiran Kemal Attartuk memiliki pengaruh paling besar dalam perkembangan pemikiran Sukarno terutama mengenai relasi agama dan negara. Pemikiran Mustafa Kemal dikutip Sukarno sebanyak 38 kali. Dari jumlah itu, 34 kalinya adalah mengenai Islam dan negara.

<sup>12</sup> Secara definitif *episteme* berarti cara manusia menangkap (memandang dan memahami) kenyataan yang ada. Istilah ini dikembangkan oleh Michael Foucault, filsuf Prancis abad XX yang hidup pada tahun 1926-1984. Dengan redaksi yang berbeda M. Abid Al-Jabiri mengatakan *episteme* atau *'aql* atau *nalar* adalah perangkat yang memproduksi pemikiran atau ide. Lihat Muhammad Abed Al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interelegius*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2003), hlm.25-30

kolonialisme, seperti Sukarno, bukanlah suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Menguatnya diskursus agama-negara yang telah berlangsung cukup lama tersebut, setidaknya karena alasan bahwa ketiga entitas ini memiliki pengikut dan kepentingannya masing-masing. Agama dianggap sebagai entitas yang memiliki nilai sakral, karena itu memang acapkali diagungkan, diunggulkan untuk menjadi semacam pembawa peran sakti bagi para pengikutnya. Sakralitas agama amat berperan dalam membangun sebuah masyarakat yang percaya pada dimensi transendental, ke-Ilahian.

Sementara itu, politik semacam kekuatan pemaksa yang sangat berpengaruh dalam aktivitas kenegaraan. Dengan politik orang dapat mengatur orang lain, karena dia memiliki kekuasaan (kuasa). Sedangkan negara dengan model dan caranya sendiri memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dalam mengatur masyarakat sebagai dasar legitimasi kekuasaan politik yang dimiliki. Pemaksaan peraturan atau kebijakan kepada rakyatnya secara politik dibenarkan, karena disanalah salah satu sumber utama legitimasi politik yang senantiasa harus dijaga.

---

<sup>13</sup> Menurut Sukarno pemisahan agama dari negara seperti yang ada di Turki bukan merupakan keadaan asing bagi masyarakat Indonesia. Dalam salah satu tulisannya, *Memudakan Pengertian Islam*, ia mengatakan, "Bagi kita keadaan Turki itu sebenarnya bukan keadaan asing. Perpisahan antara agama dengan negara itu sebenarnya, dengan ada perbedaan yang besar, sedang kita alami. Bagi kita agama Islam adalah urusan kita sendiri, dan bukan urusan pemerintah. Keadaan sama tetapi motif di sini dan di Turki lain". Lihat, Sukarno. "*Nasionalisme Islamisme Marxisme*". Dalam Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta : Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm.378.

Perdebatan mengenai dasar negara ini terulang kembali ketika rezim Orde Baru berhasil diruntuhkan oleh rakyat Indonesia yang dimotori para mahasiswa. Beralihnya Orde Baru ke Orde Reformasi ini merupakan titik klimaks dari ketidakadilan yang dirasakan rakyat Indonesia. Ketika kran demokrasi dibuka, kebebasan berpendapat dan berideologi diperbolehkan, yang selama 32 tahun ditekan oleh pemerintah, berhamburan menghinggapi setiap kepala rakyat Indonesia.

Euphoria politik ini berbuntut pada wacana mengenai hubungan Islam dan negara. Islam sebagai dasar negara kembali mencuat kepermukaan politik dan menjadi komoditas politik yang sangat menggiurkan bagi. Misalnya saja, dengan munculnya partai politik yang membawa logo Islam. Munculnya kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di sejumlah daerah seperti kerusuhan di Ambon, Poso dan fenomena terorisme seperti pengeboman di Bali, Kuningan, dan sejumlah tempat lainnya juga turut membuktikan bahwa hubungan antara agama dan negara belum tuntas.

Disinilah menariknya mengungkap kembali pemikiran seorang tokoh pendiri bangsa Ir. Sukarno tentang pandangannya mengenai hubungan agama dan negara, sebagai bahan acuan untuk membangun negara dimasa yang akan datang secara lebih mantap dan matang. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi perselisihan yang menghebat mengenai hubungan agama-negara yang sebenarnya sudah usang, dan harus diakui sekarang kita mengulang lagi peristiwa masa lalu. Dan sekarang adalah saatnya menuntaskan persoalan itu supaya tidak menjadi ganjalan di kemudian hari.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini . Antara lain :

1. Bagaimana konsepsi Sukarno tentang hubungan Islam dan Negara ?
2. Apa yang melatar belakangi Sukarno dalam membangun konsepnya?
3. Sintesa apa yang diajukan Sukarno dalam usahanya membuat keseimbangan ideologi ?
4. Bagaimana Relevansi pemikiran Sukarno tentang hubungan Islam dan negara dalam era reformasi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Menggambarkan pemikiran Suakrno tentang hubungan relasi agama dan Negara.
- b. Mencari faktor yang melatar belakangi pemikirang Sukarno tentang konsep relasi agama dan negaranya.
- c. Menjabarkan Sintesa Sukarno dalam membuat keseimbangan ideologi.
- d. Menjabarkan relevansi pemikiran Sukarno tentang relasi Islam dan negara dalam era reformasi.

### **2. Kegunaan**

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran politik Islam.

- b. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapasaja yang tertarik dengan kajian politik Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang hubungan relasi Islam dengan Negara.

#### D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai Islam dan Negara bukan merupakan hal yang baru dalam dunia pemikiran politik kontemporer. Namun sejak Kemal Pasya Atatürk mensekulerkan Turki, wacana hubungan Islam dengan Negara menjadi perdebatan yang hangat. Umat Islam terbelah menjadi dua kubu, antara yang befikiran jernih dan yang beremosi tulus atau antara yang pro dan kontra.<sup>14</sup> Banyak buku di tulis untuk mencoba menjernihkan masalah, baik secara konseptual, sejarah, maupun emperis.

Akan tetapi, karya tulis tentang relasi Islam dan Negara yang khusus dikaitkan dengan Ir.Sukarno, sejauh pengamatan kami belum ditemukan. Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang membahas sukarno baik secara sendirian maupun dikomparasikan dengan tokoh lain, di antaranya ; Bob Hering ahli sejarah dari Belanda menulis sebuah biografi politik Sukarno<sup>15</sup>. Hering dalam buku ini menempatkan Sukarno sebagai seorang nasionalis murni dan pembahasanya menekankan pada pemikiran Sukano tentang persiapan

---

<sup>14</sup> Abdul Waheb, Effendi, Al, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Terj, Amiruddin Ar Rani, (Yogyakarta : LkiS, 1994 ), hlm. 30.

kemerdekaan Indonesia yang berupa konstitusi. Sebagai sebuah buku biografi , Hering menyadari akan adanya tuntutan untuk memberikan informasi selengkap mungkin tentang kehidupan Sukarno, khususnya mengenai karir politiknya. Selain itu ada pula buku “Polemik Negara Islam : Sukarno versus Natsir yang di tulis oleh Ahmad Suhelmi.<sup>16</sup> Dalam buku ini dibahas mengenai hubungan Negara dan agama (Islam) tapi pembahasannya sangat parsial dan ter-subordinasi dengan pemikiran Sukarno yang lain. Padahal pemikiran seorang tokoh saling kait-mengkait antara satu dengan lainnya, disamping itu nuansa komparatifnya sangat kental. Kemudian ada lagi buku karangan Maslahul Falah “Islam ala Sukarno”<sup>17</sup> dalam buku ini Falah mencoba mencari akar pemikiran Islam liberal di Indonesia.

Sedangkan beberapa skripsi yang di temukan antara lain : Komparasi antara pemikiran Sukarno dan Abdurahman Wahid tentang relasi Islam dengan Negara,<sup>18</sup> pada skripsi ini memang dibahas secara khusus tentang relasi Islam dan Negara namun Nuansa komparasinya begitu kental sehingga penelusuran konsepsi yang dibangun Sukarno tidak ada. Disamping itu Nana Sumarna tidak menempatkan Sukarno sebagai seorang “ulama Islam abangan” dan gagasan

---

<sup>15</sup> Bob Hering, *Sukarno Bapak Indonesia Medeka, Sebuah Biografi Polittk*, terj. Hasono Sutejo, (Jakarta : hasta Mitra, 2003 )

<sup>16</sup> Ahmad suhelmi, *Polemik Negara Islam : Sukarno versus Natsir*, ( Jakarta : Teraju, 2002)

<sup>17</sup> Maslahul Falah, *Islam ala Sukarno, Jejak Langkah Pemikiran Liberal Indonesia*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2003 )

<sup>18</sup> Nana Sumarna, *Komparasi antara Pemikiran Sukarno dan Abdurahman Wahid Tentang Relasi Islam dan Negara*, skripsi tidak diterbitkan fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga ( 2004)

Sukarno itu teralienasi dengan gagasan Sukarno yang lain. Selanjutnya “Ide Sukarno tentang pembaharuan Islam di Indonesia”<sup>19</sup>, skripsi ini membahas tentang ide-ide Sukarno tentang pembaharuan Islam di Indonesia. Kemudian “Studi Pemikiran Sukarno tentang Islam” (Tinjauan analisis Da’wah),<sup>20</sup> pembahasan skripsi ini menekankan visi Sukarno atas Islam dalam kerangka dakwah dan gerakan dakwah Sukarno dalam mengimplementasikan ide-idenya. Selanjutnya “Hubungan Islam dan Sosialisme (Studi pemikiran Ir.Sukarno)”<sup>21</sup> pada skripsi ini yang ditekankan pengaruh paham sosialisme Sukarno pada sistem kenegaraanya.

#### E. Kerangka Teoretik

Menurut Seyed Hossein Nasr agama (*din*) memiliki makna dasar mamatuhi, menyerahkan, dan merendahkan diri dihadapan Tuhan. Sedangkan menurut istilah agama adalah norma suci yang dengan ini seluruh kehidupan dibentuk. Agama adalah panduan hidup menyeluruh yang disandarkan pada aturan-aturan yang telah diwahyukan kepada nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Jaidi Sutomo, *Ide Sukarno Tentang Pembaharuan Islam di Indonesia*, skripsi tidak di terbitkan Fakultas Adab U IN Sunan Kalijaga (2001)

<sup>20</sup> Naliari, *Studi Pemikiran Sukarno Tentang Islam, (Tinjauan analisis Da’wah*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Dakwah (1997 )

<sup>21</sup> Munawaroh, *Hubungan Islam dengan Sosialisme, Studi Pemikiran Ir. Sukarno*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2002 )

<sup>22</sup> Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam, Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, tej. Nurasih F.S. Harahap, ( Bandung : Mizan , 2003 ), hlm.20

Sedangkan Negara menurut Miriam Buduarjo adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut para warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah.<sup>23</sup> Untuk mengatur pola hubungan itu, yakni pejabat dan rakyat, diperlukan sebuah sistem politik yang disepakati bersama.

Dalam wacana politik Islam kita mengenal tiga paradigma relasi hubungan Islam dan Negara. *Pertama*, Islam tidak bisa dipisahkan dengan Negara, atau disebut paradigma integralistik. Menurut paradigma ini Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus (*ad-Din wa ad-Daulah*). Salah satu tokoh dari penganut aliran ini adalah al-Maududi<sup>24</sup> Yang menurut Munawir Sjazali, dalam pemikiran politiknya mempunyai tiga dasar (gagasan) pokok. Ketiga pokok gagasan tersebut adalah ; *pertama*, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur kehidupan. *Kedua*, kedaulatan tertinggi ada di kekuasaan Allah. Dan yang *ketiga*, sistem politik Islam tidak mengenal batas-batas geografis, bahasa dan kebangsaan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, bagi al-Maududi, Syari'ah tidak mengenal pemisahan agama dan

---

<sup>23</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ( Jakarta : Gramedia ,2000 ), hlm.40

<sup>24</sup> Lahir di India 25 september 1903 dan meninggal 23 September 1979, bernama lengkap Abu al-'Ala al-Maududi. Adalah pendiri *jam'iah islami* yang menuntut dibentuknya negara Islam di Pakistan dengan konstitusi dan sistem hukum Islam.

<sup>25</sup> Munawir Sjazali , *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm.166



negara. Syari'ah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih.

Paradigma *kedua* memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama. Dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral suatu negara. Pandangan simbiosis agama dan negara dapat diketemukan dalam pemikiran beberapa tokoh Islam, misalnya al-Mawardi.<sup>26</sup> Menurut al-Mawardi, kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian yakni memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua aktifitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik.

Paradigma *ketiga* bersifat sekuleristik yang menolak pendasaran negara pada agama (Islam). Salah satu pelopor paradigma ini adalah Ali Abdur Raziq, Seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Menurut pendapatnya, Islam tidak mempunyai kaitan apapun terhadap sistem pemerintahan, termasuk *khulafa ar-Rasidin* menurutnya merupakan sistem yang diniawi yang terlepas dari ajaran Islam. Islam, menurutnya, tidak memberikan petunjuk suatu sistem politik (bentuk negara) yang ideal untuk didirikan umat Islam. Menurut Raziq, Islam

---

<sup>26</sup> Bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bishri (354 H-450 H). Dia pemikir Islam ternama, karya-karya di bidang politik antara lain : *Al-Ahkam as-Sultaniyah* (Peraturan-peraturan Pemerintahan) dan *qawainin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik* (ketentuan-ketentuan Kewaziran, Politik Raja)

merupakan entitas keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal, berdasarkan kesamaan keyakinan dan tidak mengajarkan/menganjurkan pembentukan sebuah negara (sistem pemerintahan) tertentu. Kekuasaan politik (negara) bukan karena tuntutan agama melainkan tuntutan sosial dan politik itu sendiri

Tesis pokok Raziq ada tiga hal. *Pertama*, sistem khalifah ditolak. *Kedua*, Islam perlu adanya pemerintahan, pemerintahan ini diterapkan berdasarkan akal, bukan didasarkan agama. *Ketiga*, pemerintahan itu bukan pemerintahan agama namun pemerintahan duniawi. Islam menurut Raziq tidak mewajibkan adanya kekhalifahan karena tidak ditemukan dalil baik dari al-Qur'an ataupun al-hadist. Alasan lain Raziq mengatakan bahwa Nabi tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu untuk diterapkan karena hal tersebut adalah urusan dunia yang di serahkan kepada umat manusia untuk mengaturnya.

Kalau mengikuti tiga teori relasi agama dan negara di atas maka teori pertama, mengandaikan ideologi negara adalah agama. Pendapat yang kedua, antara ideologi negara dan agama saling mempengaruhi, artinya ideologi negara tidak membatasi kebebasan dalam beragama malah sebaliknya memberikan kesempatan yang luas bagi pertumbuhan agama apaun. Pendapat yang ketiga, ideologi negara tidak ada kaitanya dengan agama, keduanya merupakan entitas yang terpisah. Sedangkan dalam Skripsi penyusun menggunakan teori yang ketiga untuk mempertajam analisis menguak pemikiran Sukarno.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian yaitu *Relasi Islam dan Negara, Studi pemikiran politik Ir. Sukarno*.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif – analisis. Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan melihat hubungan gejala satu dengan gejala yang lain dengan interpretasi yang tepat. Analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.<sup>27</sup> Dengan arti lain penelitian ini berusaha memaparkan dan menggambarkan secara obyektif suatu permasalahan dengan corak induksi maupun deduksi agar tampak suatu maksud untuk diambil suatu kesimpulan umum dan berusaha menguraikan secara teratur konsepsi suatu wacana. Kemudian data-data tersebut dianalisis yaitu diperiksa secara konseptual atas makna yang dikandungnya, atau berarti juga memisahkan, membedakan, melihat nuansa, untuk selanjutnya melihat adanya keteraturan dan keterkaitan dengan judul penelitian ini.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63

<sup>28</sup> Lois O Kattsof, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa, Soejono Soemargono, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992), hlm. 18

## 2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya Ir. Sukarno sebagai sumber data utama (*primer*) seperti : Di bawah bendera revolusi jilid I dan II, Sarinah, Bung Karno Wacana Demokrasi dan Konstitusi, Negara dan cita-cita Islam, Kumpulan Pidato Bung Karno, dan Revolusi belum selesai. Kemudian untuk melengkapi dan mempertajam analisis kami, kami juga menggunakan buku-buku mengenai Bung Karno sebagai sumber sekunder.

## 3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, diadakan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis deduktif dan interpretatif.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari pemahaman keagamaan (Islam) Sukarno, untuk kemudian dikaitkan dengan konsep pemikiran Sukarno mengenai hubungan Islam dan negara.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh.<sup>30</sup> Disamping itu, pendekatan

---

<sup>29</sup> Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya membuat tafsiran secara obyektif. Lihat. Sudarto, *Metode Penelitian filsafat*, .hlm.42

<sup>30</sup> Atho' Mudzhar , *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press ,1998), hlm.105

hermeneutik juga mewarnai penelitian ini. Dalam hermeneutik ada dua arus besar, yaitu hermeneutik yang bersifat reproduksi makna, yang menuntut pembaca untuk berempati secara total dengan pengarang. Adapun hermeneutik yang kedua diwakili oleh Gadamer, adalah hermeneutik yang mencoba menafsirkan teks dengan produktif. Gadamer tidak memperdulikan obyektifitas sejarah masa lampau bagi dia sejarah adalah sebuah tradisi yang ingin membangun visi dan horizon di masa depan. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberi makna terhadap faktor-faktor sosio-historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.

Pendekatan ini mencoba untuk menelaah secara mendalam gagasan pemikiran seorang tokoh dengan mempertimbangkan hasil interaksi dengan lingkungannya. Pendekatan ini digunakan untuk mencari kembali dan meneliti hubungan antara ide pada satu fihak, kecenderungan emosional difihak lain dan kepentingan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Disamping itu.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian bab kedua berisikan tentang pengertian agama dan negara

---

secara umum, yang dimulai dengan definisi agama, asal usul agama dan memahami Islam sebagai agama kebajikan serta definisi negara dan unsur-unsurnya sebagai pisau analisis untuk membongkar apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh agama dan negara tersebut yang kemudian disinergikan dengan pemikiran Sukarno tentang relasi Islam dan negara pada bab selanjutnya.

Bab tiga menjelaskan pokok-pokok pemikiran Sukarno tentang ideologi negara. Nasionalisme, sosialisme, marhenisme, demokrasi, Pancasila, dan pandangan sukarno tentang Islam untuk mencari sinergi pemikiran Sukarno tentang relasi Islam dan negara dengan pemikiran-pemikirannya yang lain yang disuguhkan setelah mengungkap biografi Sukarno, dalam hal ini faktor keluarga dan pendidikannya menjadi objek utama. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran mengenai faktor-faktor pembentuk pemikiran dan kejiwaan Sukarno. Kemudian bab ke empat berisi analisis dan relevansi pemikiran Sukarno tentang relasi agama dan negara. Sedangkan pada bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan seperti yang terpapar dalam empat bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sukarno dalam memandang Islam berpijak pada aspek historis, Islam olehnya dipandang sebagai agama ritual. Sukarno memandang Islam dari sudut pandang yang paling hakiki yaitu pada dataran ketauhidan (aqidah) saja, sehingga Sukarno menolak keras usaha-usaha yang akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara teokratis (negara agama, Islam), dengan menerapkan syari'ah sebagai hukum negara. Dan untuk menyatukan pertentangan ideologi-ideologi tersebut Sukarno menawarkan konsep Nasionalisme yang diambil dari budaya sendiri. Karena dalam doktrin Islam tidak secara tegas menegaskan bentuk negara dan tidak ada kesepakatan ulama' menegani hal tersebut, Sukarno berkeyakinan bahwa sistem teokrasi justru bertentangan dengan "apinya Islam", karena menghilangkan sistem musyawarah. Sedangkan syari'ah di posisikan berjalan sebagai kultur kehidupan dalam masyarakat dan sekaligus sebagai media kontrol atas pemerintah yang zalim.
2. Pemikiran sukarno terbentuk oleh unsur-unsur seperti; sinkretis keluarga jawa, marxisme (khususnya dialektika materialis dan materialisme sejarah) yang terdapat dalam pola pemikiran Barat, sejarah nasionalisme yang

berkembang di negara-negara Asia, sekularisme yang dipraktekkan Turki, dan *the spirit of Islam*-nya Kwaja Kamaluddin, syeed Amer Ali dan pemikir-pemikir pembaharu Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Moh. Abduh Sukarno juga termotivasi oleh perjumpaannya dengan tokoh-tokoh pergerakan-baik nasionalis, marxis, maupun Islamis yang sama-sama anti imperialisme dan kolonialisme-sewaktu tinggal di rumah Cokro Aminoto dan situasi pertentangan ideologis yang telah menyebabkan rapuhnya pergerakan nasional pada gilirannya sangat mempengaruhi pemikiran Sukarno dalam usahanya menciptakan keselarasan bermasyarakat dan persatuan Nasional.

3. Hal ini terbukti; 1) dengan usaha kerasnya menciptakan persekutuan ideologis antara Islam, Marxisme, dan Nasionalisme. 2) Merealisasikan usahanya dengan menelorkan konsep Pancasila dan 3) memberikan perlakuan yang adil terhadap semua aspirasi politik yang diekspresikan dengan mencetuskan konsepsi Nasakom pada tahun 1960.
4. Setelah Orde baru jatuh dan berganti orde reformasi, kebebasan berideologi diperbolehkan, sebagian umat Islam menuntut kembali diberlakukannya syari'ah sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan mengganti dasar negara dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Untuk menciptakan persatuan Nasional, Sukarno dalam memandang ideologi-ideologi tidak berangkat dari normatifitas ideologi tersebut, sebaliknya ia melihatnya dari perspektif sejarah dan tujuan yang sama dari setiap ideologi tersebut yaitu mensejahterakan rakyat. Dan membiarkan praktik syari'ah berjalan secara kultural.



## B. Saran-saran

Dari uraian di atas, penyusun mencoba merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang positif :

1. Perlu adanya telaah lebih lanjut dan mendalam mengenai konsep relasi Islam dan negara supaya dikemudian hari masalah ini tidak terulang kembali seperti yang terjadi pada orde reformasi yang sebetulnya hanya mengulang sejarah masa lalu. Hal ini menjadi bukti belum tuntasnya persoalan hubungan Islam dengan negara.
2. Perlu kiranya mengkaji kembali tokoh-tokoh pribumi yang mengikuti proses berdirinya NKRI untuk dijadikan perbandingan dalam rangka menuntaskan persoalan bangsa khususnya mengenai hubungan antara agama dan negara dengan berpijak pada budaya sendiri.
3. Suatu kajian pemikiran seorang tokoh secara sengaja atau tidak telah mencerminkan subjektifitas penulisnya, untuk itu sejauh bisa diusahakan subjektifitas tersebut diminimalisir. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penelusuran secara komprehensif.

Demikian, skripsi ini dibuat, penyusun yakin masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya, menyadari hal itu, dengan keterbatasan bahan bacaan yang tersedia, penulis sepenuhnya bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang ada dalam skripsi ini dan senantiasa mengharap kritik konstruktif dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/ Tafsir

Dimasyqi, Ismail Ibn Kasir Al-Qraisy ad-, *Tafsir al-Qur'an*, 4 juz, Semarang : cv. Toha Putra, t.t.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 juz, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1988

Maragi, Ahmad mustofa al-, *Tafsir I Maragi*, 10 juz, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1965 M/ 1385 H.

Suyuthi, Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-, *Tafsir Jalalain*, 3 jilid, terj. Muhyidin Syaf dan Bahrin Abu Bakar, Bandung : Sinar Baru, 1990.

### B. Hadis dan 'Ulumul Hadis

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 2 jilid, Beirut : Dar Al-Fikr, 1414 H.

Asqalani, Ibn Hajr al-, *Fathul Bari*, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-, *Sahih al Bukhari*, 4 jilid,

### C. Fiqh/ Usul fiqh

Abdul Ghani, Ruslan, *Pancasila Ideologi Pemersatu*, Jakarta : Pantjaka, 1962

Alam, Wawan Tunggul, *Demi Bangsaaku, Pertentangan Sukarno Vs Hatta*, Jakarta : Gramedia, 2003

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1982

Arkoun, Muhamad, *Islam Agama Sekuler, Penulusuran Sekularisme dalam Agama-Agama di Dunia*, terj. Sunarwoto Dema, Yogyakarta : Belukar, 2003

Arroisi, Arman, *Pengembaraan Batin Bung Karno*, cet. II, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993

Boland, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj. Safruddin Bahar, Jakarta : Grafitti Press, 1985

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dsar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia ,2000

- Dahm, Benhard, *Sukarno dan Perjuangannya* terj. Hasan Basari, Jakarta : LP3ES, 1987
- Djaja, Tamar, *Sukarno-Hatta Persamaan dan Perbedaan*, Jakarta : Sastra Hudaya, 1981
- Effendi, Abdul Waheb, Al, *Masyarakat tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, terj. Amiruddin Ar Rani, Yogyakarta : LkiS, 1994
- Falah, Maslahul, *Islam ala Sukarno, Jejak Langkah Pemikiran Liberal Indonesia*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2003
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta : Paramadina, 1996
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999
- Jabiri, Muhammad abed, Al, *Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interelegius*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2003
- Karim, Abdul, *Mengabdi Agama Nusa dan bangsa, Sahabat Karib Bung Karno*, Jakarta : Gunung Agung, 1982
- Lubis, M. Rdwan, *Pemikiran Sukarno Tentang Islam*, Jakarta : CV. Mas Agung, 1992
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad , Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press ,1998
- Mulia, Musdah, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta : Paramadian,2001
- Madjid, Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, cet. VI, Jakarta : Paramadina, 2002
- Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam, Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, tej. Nurasiah F.S. Harahap,Bandung : Mizan , 2003
- Nasr, Seyyed Hossein *Islam, Antara Cita dan Fakta*, alih bahasa, Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, Yogyakarta : Pusaka, 2001
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991

- \_\_\_\_\_, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 jilid cet. 5, Jakarta : UUI- Press
- Noer, Delier, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945*, Jakarta : LP3ES, 1991
- Notosoetardjo, Ahmad, *Menggali Api Revolusi dari Sebelas Amanat Bung Karno*, cet.II, Jakarta : LPPSRI dan Endang, 1964
- Rasyid, Daud, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta : Gema Insaani Pres, 1998
- Raziq, Ali Abdul, Al, *Dasar-Dsar Pemerintahan Islam, Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa, Zaid Su'udi, Yogyakarta : Jendela, 2002
- Salam, Solichin, *Bung Karno Putra Fajar*, Jakarta : Gunung Agung, 1984
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : islamika, 2003
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : UI-Press, 1993
- Sukarno, *Bung Krno Wacana Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta : Grasindo, 2001
- \_\_\_\_\_, *Negara Nasional dan Cita-Cita Islam*, Jakarta : Pusat Data Indikator, 1999
- \_\_\_\_\_, *Bung Karno dan Wacana Islam*, Jakarta : Grasindo, 2000
- Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1964
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1994
- Smith, Edwad Conrad & Arnold John Zurcher (ed), *Dictionary of American Politics*, Barnes & Nob's, INC, 1966
- Thaba, Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Watt, William Montgomery, *Islam*, terj. Imron Rosjadi, Yogyakarta : Jendela, 2002

#### D. Kelompok Lain-lain

- Abdullah, Taufiq & Abduraahman Surjontiharjo (red), *Ilmu Sejarah dan Historiografis, Arah dan Prespektif*, Jakarta : Gramedia, 1995
- Adam, Cindy, *Sukarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, alih bahasa, Abdul Bar Salim, Jakarta : Gunung Agung, 1966
- Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1982
- Amelz, *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan perjuangannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1952
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung : MIZAN, 1995
- Baso, Ahmad *Civil Soceity Versus Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran Civil Soceity di Indonesia* , Bandung : Pustaka hidayah, 1999
- Efendi, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998
- \_\_\_\_\_, *Tragedi Raja Midas, Modernisme dan Krisis Modernitas*, Jakarta : Paramadina, 1998
- Endraswara, Suwardi, *Mistik Kejawen, Sinkretism Symbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta : Narasi, 2003
- Faqih, Mansour, *Agama dan Proses Demokratisasi di Indonesia*, dalam *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Gert, Clifort, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1983
- Hering, Bob, *Sukarno Bapak Indonesia Merdeka, Sebuah Biografi Politik*, terj. Harsono Sutejo, Jakarta : hasta Mitra, 2003
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj, Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000
- Legge, John D, *Sukarno Sebuah Biografi*, terj, Tim. PSH, Jakarta : Sinar Harapan, 1985
- Martowidjoyo, Mangil, *Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*, Jakarta : Grasindo, 1999

- Malik, Adam, *Mengabdikan Republik*, Jakarta : Gunung Agung, 1980
- Parsudi Suparlan, *Kata Pengantar*, dalam Roland Roberston (ed), *Agama, dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, Jakarta : Rajawali Press, 1998
- Renan, Ernest, *Apakah Bangsa Itu? (Qu'est ce qu'une nation)*, alih bahasa Prof.Mr. Sunario, Bandung : Alumni, 1994
- Roem, Muhammad, *Bunga Rampai Dari Sejarah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977
- Rapar, J.H. *Filasafat Politik, Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 200
- Ridwan, Nur Khalik, *Detik-detik Pembongkaran Agama, Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan*, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2003
- Riff, Michael. A (ed), *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam : Sukarno versus Natsir*, Jakarta : Teraju, 2002
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialis Utopis ke Perselisihan Revisionis*, Jakarta : Gramedia, 2001
- Sumaryono, E, *Hermeneutik Sebuah Metode Filasafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1993
- Suriasumantri, S. Jujun, *Imu Dalam Perspektif*, Sebuah kumpulan karangan tentang hakekat ilmu, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta : Kanisius, 1992
- Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta : Gramedia, 1995
- Soerojo, Soegiarso, *Siapa Menabur Benih akan Menuai Badai, G 30 S/ PKI dan peran Bung Karno*, Jakarta : Sri Murni , 1988
- Wahid, Hasyim dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Yogyakarta : LkiS, 1999

Lampiran I

No	Hlm	FN	Terjemahan
Bab III			
1	56	21	Hai orang-orang yang beriman janganlah memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, (Q.S Ali Imron (3) : 130



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

### IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Šābit bin Zufi at-Tamīmī. Lahir di Kufah ada tahun 150 H./699 M., pada masa pemerintahan al-Qālid bin Abdul Mālik beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abū Hanīfah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud dan tawādlu' serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, bahkan pernah menolak sebagai hakim (qadhī) yang ditawarkan oleh al-Mansūr. Konon, karena penolakannya itu ia dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Beliau meninggalkan beberapa karya diantaranya adalah; *al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imām Abū Hanīfah, diriwayatkan oleh Abū Yūsuf), dan *Fiqh Akbār*. Abū Hanīfah meninggal pada tahun 150 H./767 M., pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

### IMAM MĀLIK BIN ANAS

Imām Mālik bin Anas merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Malikī, mereka tersebar luas hampir merata di seluruh negara Islam. Imām Mālik sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H./712 M., beliau adalah salah satu ulama yang termuka, terutama dalam bidang ilmu fiqh dan hadis. Salah satu karyanya yang terkenal hingga saat ini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *al-Muwatha'*. Imām Mālik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

### IMAM SYĀFI'I

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idrīs as-Syāfi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M. dan meninggal pada tahun 204 H./820 M., beliau adalah salah satu dari *mazāhib al-Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Irak atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan pendapat atau pandangan beliau yang dikemukakan setelah hijrah ke Mesir disebut *qaul Jadīd*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *ar-Risālah* (ushul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).



## IMAM AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M., beliau merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan al-Muktasim (khalifah Abasiyyah), beliau sempat dipenjara karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan dibebaskan pada masa al-Mutawakkil. Beliau meninggal di Bagdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 H./855 M., sepeninggalnya, pemikiran-pemikirannya berkembang pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

## ALI ABD AR-RAZIQ

Ali Abd ar-Raziq lahir pada tahun 1888 dan wafat tahun 1966. Dia mendapatkan pendidikan agama dari Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian ia belajarnya di Universitas Oxford, Inggris. Dia seorang cendekiawan muslim dan hakim pada Mahkamah Syari'ah Mesir. Dia dikutuk dan diusir dari Mesir oleh majlis al-Azhar karena gagasannya yang menolak sistem kekhilafan yang ia sebarkan dalam bukunya *Islam wa Usul al-Hukm*.

## AL-GAZALI

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gazali. Ia lahir di desa Gazaleh tahun 450 H. Ia terkenal dengan sebutan hujjatu al-Islam, sufi dan ia ahli dalam ilmu kalam, filsafat, dan usul fiqh. Ia wafat pada tahun 505 H. selain itu karya tulisnya menjadi sangat monumental bagi pelurusan dunia sufi yaitu kitab *ihya' 'Ulum ad-Din*. Ia juga seorang ahli usul fiqh dalam mazhab Syafi'i dan karyanya yaitu *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul*.

## SAYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI

Afghani lahir dalam tahun 1838. Menurut penuturannya sendiri ia dilahirkan di As'adabad, dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan, dari satu keluarga penganut mazhab Hanafi dan keturunan Husein bin Ali bin Abi Thalib. Kebangkitan Islam ditandai dengan munculnya al-Afghani. Setelah meninggalkan Afganistan, ia berkelana dari daerah satu ke daerah yang lain untuk mempropagandakan kebangkitan Islam untuk menentang gerakan kolonialisme-imperialisme Barat dan despotisme Timur. Dia wafat di Istanbul pada bulan Mei tahun 1897, karena kanker yang berawal dari dagunya. Terdapat kecurigaan bahwa penyakit kanker al-Afghani itu berasal dari makanan beracun yang didalangi oleh komplotan pejabat Tinggi kepercayaan Sultan Abdul Hamid, Turki.

## **MASDAR FARID MAS'UDI**

Masdar Farid Mas'udi adalah Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Ia lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikannya banyak diperoleh di pesantren terutama di Tegalrejo Magelang dan Krapyak Yogyakarta. Mendapat gelar sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdaam NU, juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan banyak menulis tentang politik dan keislaman.

## **MANSOUR FAKIH**

Mansour Faqih dikenal sebagai aktivis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro Jawa Timur. Memperoleh gelar Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan gelar Doktor di Universitas of Massachusetts USA, dalam bidang pendidikan dan perubahan sosial. Pernah aktif di LP3ES, P3M dan pernah mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan UI. Selain itu selama 4 tahun (1992-1996) sebagai Country Representative OXFAM-GB di Indonesia. Meninggal pada tahun 2004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran III

## CURICULUM VITAE

Nama : Mohammad Yusuf Awaluddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 2 Juli 1980  
Agama : Islam  
Jenis Kelaamin : Laki-laki  
Alamaat Aasal : JL. Poros Utama, Widhe, RT. 018, RW. 002,  
Brondong, Lamongan, Jawa Timur  
Alamat Jogja : JL Kaliurang Km 7 Banteng Baru JL Adyaksa IV

### Latar Belakang Keluarga

Nama Ayah : Mohammad Raspandi  
Nama Ibu : Siti Maesyaroh  
Alamat : JL. Poros Utama, Widhe, RT. 018, RW. 002,  
Brondong, Lamongan, Jawa Timur  
Jumlah saudara : 1 Orang  
Anak Ke : 1 (satu)

### Latar Belakang Pendidikan

1. TK Raudlatul Atfal, Sendangharjo, Brondong, Lamongan, Jawa Timur
2. SD Negeri I, Sendangharjo, Brondong, Lamongan
3. MTs Darul Afkar, Sendangharjo, Brondong, Lamongan
4. MAN Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta